



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA LT. 10 UTARA, JL. LAP. BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA 10710
TELEPON : (021) 3449230 PES. 4601; FAKSIMILE ; (021) 3442948; SITUS www.djkn.depkeu.go.id

Nomor : S - 2 /KN/2014
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penyusutan BMN dan Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2013

02 JAN 2014

Yth. terlampir
di tempat

Menyusuli surat kami nomor S-1309/KN/2013 tanggal 9 Desember 2013 perihal Persiapan Penyusunan Laporan Barang Pengguna (LBP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L) TA 2013 serta menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi (monev) kami atas penerapan penyusutan pada LBP Semester I Tahun 2013, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. surat kami nomor S-1309/KN/2013 tersebut di atas menyampaikan langkah-langkah utama yang harus dilakukan oleh seluruh K/L dalam rangka penyusunan LBP dan LK K/L TA 2013 secara tepat waktu dan akuntabel.
2. hasil monev kami atas atas penerapan penyusutan pada Semester I TA 2013 menyimpulkan beberapa risiko dan permasalahan yang perlu dimitigasi.
3. sehubungan dengan butir 1 dan 2, terlampir kami sampaikan tindak lanjut dari sisi teknis yang perlu dilakukan oleh seluruh K/L guna meminimalisir risiko kesalahan dalam penerapan dan penyajian penyusutan pada LBP dan LK K/L TA 2013, sebagai berikut :
 - a. pedoman teknis perlakuan koreksi perhitungan penyusutan BMN sampai dengan 30 Juni 2013.
 - b. pedoman teknis perlakuan penyusutan atas satker inaktif.
 - c. pedoman teknis tindak lanjut koreksi normalisasi atas data BMN bermasalah.
 - d. pedoman pengungkapan penyusutan dalam Catatan Ringkas Barang.
4. langkah-langkah utama pada butir 1 dan pedoman teknis sebagaimana terlampir agar dilakukan oleh seluruh satker K/L dalam penyusunan LBP dan LK K/L TA 2013.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. - Direktur Jenderal
Direktur Barang Milik Negara

Chalimah Pujihastuti
NIP 19680216 199503 2 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara seluruh Indonesia
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang seluruh Indonesia

A. Pedoman teknis perlakuan koreksi perhitungan penyusutan BMN sampai dengan 30 Juni 2013.

- a. Apabila diketahui proses perhitungan dan penyajian penyusutan yang telah dilakukan satker salah/tidak sesuai dengan ketentuan, langkah penyelesaian yang diambil adalah sebagai berikut:
 - 1) Meminta satker untuk memproses ulang seluruh rangkaian tahapan penyusutan dimulai dari melakukan koreksi normalisasi, penyusutan pertama kali, penyusutan transaksional Semester I dan II Tahun 2013, serta penyusutan reguler Semester I dan II Tahun 2013.
 - 2) Satker melakukan proses pengiriman ulang ADK ke Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan unit akuntansi di atasnya secara berjenjang.
- b. Dapat kami informasikan bahwa guna mengantisipasi resiko penginputan ulang atas transaksi periode Semester I dan II Tahun 2013, saat ini Kementerian Keuangan telah melakukan *launching* aplikasi Koreksi Penyusutan¹³ guna mengulangi rangkaian proses penyusutan dengan tidak menghapus transaksi periode Semester I dan II Tahun 2013. (Dapat diunduh melalui website DJKN (www.djkn.depkeu.go.id) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (www.perbendaharaan.go.id)).

B. Langkah teknis perlakuan penyusutan atas satker inaktif.

- a. Pelaksanaan likuidasi atas satker inaktif dilakukan sebagaimana diamanatkan PMK nomor 198/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian/Lembaga.
- b. Dalam hal proses likuidasi belum selesai, proses penyusutan pada satker inaktif dapat diambil alih oleh unit akuntansi di atasnya. Secara teknis proses penyusutan dilakukan oleh unit akuntansi di atasnya dengan menggunakan aplikasi SIMAK BMN tingkat satker (BMNKPB13), lalu dilakukan proses pengiriman ADK ke SAK dan unit akuntansi di atasnya secara berjenjang.

C. Langkah teknis tindak lanjut koreksi normalisasi atas data BMN bermasalah.

Apabila terdapat koreksi normalisasi atas data BMN bermasalah, agar satker menindaklanjuti dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 94/KMK.6/2013 tentang Modul Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagai berikut:

- a. Menelusuri keberadaan fisik BMN tersebut;
- b. Dalam hal secara fisik keberadaan BMN tersebut ada, maka satker diharuskan melakukan pencatatan kembali atas BMN tersebut pada Aplikasi SIMAK BMN. Pencatatan kembali BMN dilakukan sesuai dengan kondisi kesalahan pencatatannya. Berikut ini merupakan contoh pencatatan kembali BMN:
 - 1) BMN yang dibukukan ganda sebagai aset tetap dan aset lainnya, ditindaklanjuti dengan dicatat kembali melalui transaksi saldo awal.
 - 2) BMN yang dibukukan ganda pada Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel, ditindaklanjuti dengan dicatat kembali melalui transaksi saldo awal.
 - 3) Kesalahan Kode Barang dan/atau Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dalam melakukan koreksi nilai/kuantitas, ditindaklanjuti dengan melakukan kembali koreksi nilai/kuantitas dengan Kode Barang dan/atau NUP yang seharusnya.
 - 4) Selanjutnya atas Kode Barang dan/atau NUP yang salah dikoreksi nilai/kuantitas, dicatat kembali melalui transaksi saldo awal.

- c. Dalam hal secara fisik keberadaan BMN tersebut tidak ada, maka satker membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan dalam membukukan BMN tersebut di dalam SIMAK-BMN. Surat keterangan tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
- 1) Kode BMN;
 - 2) Uraian BMN;
 - 3) Nomor Urut Pendaftaran/Nomor Aset;
 - 4) Kuantitas BMN;
 - 5) Nilai BMN.
- d. Melakukan pengungkapan terkait koreksi normalisasi beserta tindak lanjutnya di dalam CRB.
- Ilustrasi pada huruf b dan c hanya merupakan contoh, sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat kondisi selain tersebut di atas.

D. Pedoman pengungkapan penyusutan dalam Catatan Ringkas Barang.

- a. PMK Nomor 1/PMK.06/2013 mengatur bahwa Kementerian/Lembaga (K/L) wajib mengungkapkan informasi berkenaan dengan penyusutan aset tetap dalam CaLK. Informasi yang diungkapkan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
- 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- Lebih lanjut pengungkapan penyusutan di dalam CRB diatur dalam KMK Nomor 94/KMK.6/2013.
- b. Ilustrasi penyajian dan pengungkapan penyusutan aset tetap sebagaimana lampiran III dimaksudkan agar K/L dapat memedomani ilustrasi tersebut, hingga pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut diterbitkan.

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA ... (1) ...
PERIODE ... (2) ...

I. PENDAHULUAN

- Dasar Hukum (*berisi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan laporan BMN*)
- Entitas Pelaporan (*berisi uraian/informasi mengenai entitas pelapor*)
- Periode Laporan (*berisi penjelasan mengenai periode laporan*)

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

(menjelaskan kebijakan-kebijakan Penatausahaan BMN pada entitas pelapor, antara lain kebijakan penggolongan/kodefikasi, kapitalisasi, rekonsiliasi, dan penyusutan BMN)

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

... (1) ... (2) ... merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh ... (3) ...

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada ... (2) ... ini adalah sebesar Rp... (114) ... (*...dalam huruf...*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp... (15) ... (*...dalam huruf...*) dan nilai mutasi yang terjadi selama ... (2) ... sebesar Rp... (115) ... (*...dalam huruf...*). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

(paragraf berikut diisi apabila mengelola dana yang berasal dari BA 999, apabila tidak ada, uraian ini dapat diiadakan)

Selain memperoleh dana dari DIPA ... (3) ..., dalam periode laporan ini ... (3) ... juga mengelola dana yang berasal dari BA 999.07 (Belanja Subsidi) sebesar Rp... (6) ... (*...dalam huruf...*), dan BA 999.08 (Belanja Lain-lain) sebesar Rp... (6) ... (*...dalam huruf...*). Selanjutnya ... (1) ... atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA 999.07 dan BA 999.08) disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.

(paragraf berikut hanya diisi oleh jenjang entitas pelapor UAPPB-W/UAPPB-E1/UAPB)

... (1) ... (2) ... merupakan himpunan dari LBKP pada ... (7) ... Kuasa Pengguna Barang, yang terdiri atas ... (8) ... satker Kantor Pusat, ... (9) ... satker Kantor Daerah, ... (10) ... satker Dekonsentrasi, ... (11) ... satker Tugas Pembantuan, ... (12) ... satker BLU, dan satker ... (13) ... (sebagaimana daftar satker terlampir).

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (*untuk tahunan*)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);

12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada ... (3) ...;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER ... (2) ...

1. Saldo Awal ... (2) ...

Nilai BMN per ... (14) ... menurut ... (3) ... adalah sebesar Rp ... (15) ... (...dalam huruf...) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp ... (16) ... (...dalam huruf...) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp ... (17) ... (...dalam huruf...).

(paragraf berikut diisi apabila terjadi perbedaan saldo awal)

Terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan, sebesar Rp ... (18) ... (...dalam huruf...) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp ... (19) ... (...dalam huruf...) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp ... (20) ... (...dalam huruf...). Perubahan penyajian saldo awal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. (21) ...
- b. (21) ..., dst.

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara ... (2) ...

Mutasi BMN per ... (2) ... adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada ... (1) ... per ... (22) ... sebesar Rp ... (23) ... (...dalam huruf...), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp ... (24) ... (...dalam huruf...) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp ... (25) ... (...dalam huruf...).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
(26) (27) (28) (29) (30)
JUMLAH (31) (32) (33)

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp ... (34) ... yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp ... (35) ... (...dalam huruf...) dan kondisi usang senilai Rp ... (36) ... (...dalam huruf...).

b. Tanah

Saldo Tanah pada ... (1) ... per ... (22) ... sebesar Rp ... (37) ... (...dalam huruf...) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas ... (38) ... m² dengan nilai sebesar Rp ... (39) ... (...dalam huruf...), mutasi tambah seluas ... (40) ... m² dengan nilai sebesar Rp ... (41) ... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang seluas ... (42) ... m² dengan nilai sebesar Rp ... (43) ... (...dalam huruf...).

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
..... (44) (45)
..... (44) (45)
..... (44) (45)

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
..... (46) (47)
..... (46) (47)
..... (46) (47)

Dari jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah ... (48) ... bidang dengan nilai sebesar Rp ... (49) ... (...dalam huruf...), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah ... (50) ... bidang dengan nilai sebesar Rp ... (51) ... (...dalam huruf...).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik (52) (52)
Rusak Ringan (52) (52)
Rusak Berat (52) (52)

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah ... (53) ... m²/Rp ... (53) ...

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh ... (3) ..., yaitu:

Permasalahan Tanah	Kuantitas (bidang/m ²)	Nilai (Rp)
Sengketa (54) (54)
Tidak terdapat bukti Kepemilikan (55) (55)
Dikuasai pihak lain (56) (56)
..... (57) (57)

(paragraf berikut diisi informasi lainnya yang perlu untuk diungkapkan terkait Penatausahaan dan pengelolaan BMN dimaksud)

.....
 (58) ...

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada ... (1) ... per ... (22) ... adalah sebesar Rp ... (37) ... (...dalam huruf...), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp ... (39) ... (...dalam huruf...), mutasi tambah sebesar Rp ... (41) ... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang sebesar Rp ... (43) ... (...dalam huruf...).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) ... (59) ...; (sesuai bidang barang pada akun Peralatan dan Mesin)

Saldo ... (59) ... pada ... (1) ... per ... (22) ... sebesar Rp ... (37) ... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar ... (38) ... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp ... (39) ... (...dalam huruf...) mutasi tambah jumlah barang ... (40) ... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp ... (41) ... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang jumlah barang ... (42) ... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp ... (43) ... (...dalam huruf...).

Mutasi Tambah ...(59)... (sesuai bidang barang pada akun Peralatan dan Mesin) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
..... (44) ° (45) (45)
..... (44) (45) (45)
..... (44) (45) (45)

Mutasi Kurang ...(59)... (sesuai bidang barang pada akun Peralatan dan Mesin) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
..... (46) (47) (47)
..... (46) (47) (47)
..... (46) (47) (47)

Dari jumlah ...(59)... (sesuai bidang barang pada akun Peralatan dan Mesin) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah ...(48)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(49)... (...dalam huruf...), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah ...(50)... kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(51)... (...dalam huruf...).

Dari jumlah ...(59)... (sesuai bidang barang pada akun Peralatan dan Mesin) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik (52) (52)
Rusak Ringan (52) (52)
Rusak Berat (52) (52)

Kelompok barang ...(sesuai bidang barang pada akun neraca dimaksud)... yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah (53) ...unit/Rp ...(53)....

(paragraf berikut diisi informasi lainnya yang perlu untuk diungkapkan terkait Penatausahaan dan pengelolaan BMN dimaksud).

..... (58)...

2) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

...(dijelaskan besaran penyusutan dengan merinci per akun neraca)...

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada ...(1)... per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp...(39)... (...dalam huruf...), mutasi tambah sebesar Rp...(41)... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang sebesar Rp...(43)... (...dalam huruf...).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) ...(59)...; (sesuai bidang barang pada akun Gedung dan Bangunan)

Saldo ...(59)... pada ...(1)... per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak ...(38)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(39)... (...dalam huruf...), mutasi tambah sejumlah ...(40)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai

sebesar Rp...(41)... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang sejumlah ...(42)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(43)... (...dalam huruf...).

Mutasi Tambah ...(59) (sesuai bidang barang pada akun Gedung dan Bangunan) tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
..... (44) (45) (45)
..... (44) (45) (45)
..... (44) (45) (45)

Mutasi Kurang ...(59)... (sesuai bidang barang pada akun Gedung dan Bangunan) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
..... (46) (47) (47)
..... (46) (47) (47)
..... (46) (47) (47)

Dari jumlah ...(59)... (sesuai bidang barang pada akun Gedung dan Bangunan) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah ...(48)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(49)... (...dalam huruf...), sedang dalam proses penghapusan adalah ...(50)... kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(51)... (...dalam huruf...).

Dari jumlah ...(59)... (sesuai bidang barang pada akun neraca dimaksud) di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik (52) (52)
Rusak Ringan (52) (52)
Rusak Berat (52) (52)

(paragraf berikut diisi informasi lainnya yang perlu untuk diungkapkan terkait Penatausahaan dan pengelolaan BMN dimaksud).

.....(58)...

2) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

...(dijelaskan besaran penyusutan dengan merinci per akun neraca)...

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada ...(1)... per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp...(39)... (...dalam huruf...), mutasi tambah sebesar Rp...(41)... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang sebesar Rp...(43)... (...dalam huruf...).

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) ...(59)...; (sesuai bidang barang pada akun neraca dimaksud)

Saldo(59)... pada ...(1)... per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak ...(38)...(sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(39)... (...dalam huruf...), mutasi tambah sebanyak ...(40)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(41)... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang sejumlah ...(42)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(43)... (...dalam huruf...).

Mutasi Tambah ...(59)... (sesuai bidang barang pada akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
..... (44) (45) (45)
..... (44) (45) (45)
..... (44) (45) (45)

Mutasi Kurang...(59) (sesuai bidang barang pada akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
..... (46) (47) (47)
..... (46) (47) (47)
..... (46) (47) (47)

Dari jumlah ...(59)... (sesuai bidang barang pada akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan)... di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah ...(48)...(sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp ...(49)... (...dalam huruf...), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak ...(50)... kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(51)... (...dalam huruf...).

Dari jumlah ...(59)... (sesuai bidang barang pada akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik (52) (52)
Rusak Ringan (52) (52)
Rusak Berat (52) (52)

(paragraf berikut diisi informasi lainnya yang perlu untuk diungkapkan terkait Penatausahaan dan pengelolaan BMN dimaksud).

.....(58)...

2) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

...(dijelaskan besaran penyusutan dengan merinci per akun neraca)...

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada ...(1)... per ...(22)... sebesar Rp...(37)... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp...(39)... (...dalam huruf...), mutasi tambah sebesar Rp...(41)... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang sebesar Rp... (43)... (...dalam huruf...).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) ...(59)...; (sesuai bidang barang pada akun Aset Tetap Lainnya)

Saldo ...(59)... pada ...(1)... per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah ...(38)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(39)... (...dalam huruf...), mutasi tambah sejumlah ...(40)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(41)... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang sejumlah ...(42)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(43)... (...dalam huruf...).

Mutasi Tambah ...(59)... (sesuai bidang barang pada akun Aset Tetap Lainnya)... tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
..... (44) (45) (45)
..... (44) (45) (45)
..... (44) (45) (45)

Mutasi Kurang ...(59)... (sesuai bidang barang pada akun Aset Tetap Lainnya) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
..... (46) (47) (47)
..... (46) (47) (47)
..... (46) (47) (47)

Dari jumlah Aset Tetap Lainnya di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah ...(48)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(49)... (...dalam huruf...), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah ...(50)... kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp ... (51)... (...dalam huruf...).

Dari jumlah ...(59)... (sesuai bidang barang pada akun Aset Tetap Lainnya) di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas ((sesuai dengan satuan barang masing-masing))	Nilai (Rp)
Baik (52) (52)
Rusak Ringan (52) (52)
Rusak Berat (52) (52)

(paragraf berikut diisi informasi lainnya yang perlu untuk diungkapkan terkait Penatausahaan dan pengelolaan BMN dimaksud).

..... (58)...

2) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.

...(dijelaskan besaran penyusutan dengan merinci per akun neraca)...

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada ... (1) ... per ... (22) ... adalah sebesar Rp... (37) ... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp... (39) ... (...dalam huruf...), mutasi tambah sebesar Rp... (41) ... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang sebesar Rp... (43) ... (...dalam huruf...).

Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
..... (60) (60)
..... (60) (60)
..... (60) (60)

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
..... (61) (61)
..... (61) (61)
..... (61) (61)

Dari jumlah KDP di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah ... (48) ... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp... (49) ... (...dalam huruf...), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah ... (50) ... kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp ... (51) ... (...dalam huruf...).

h. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya pada ... (1) ... per ... (22) ... adalah sebesar Rp... (37) ... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp... (39) ... (...dalam huruf...), mutasi tambah sebesar Rp... (41) ... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang sebesar Rp... (43) ... (...dalam huruf...).

1) Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada ... (1) ... per ... (22) ... adalah sebesar Rp... (37) ... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp... (38) ... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp... (39) ... (...dalam huruf...), mutasi tambah sejumlah ... (40) ... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp... (41) ... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang sejumlah ... (42) ... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp... (43) ... (...dalam huruf...).

Mutasi Tambah Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
..... (44) (45) (45)
..... (44) (45) (45)
..... (44) (45) (45)

Lampiran II
 Surat Direktur Barang Milik Negara
 Nomor : S - 2 /KN/2014
 Tanggal : 2 Januari 2014

Mutasi Kurang Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
..... (46) (47) (47)
..... (46) (47) (47)
..... (46) (47) (47)

Rincian Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada ...(1)... per ...(22)... per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1 Tanah(121)(121)
2 Peralatan dan Mesin(121)(121)
3 Gedung dan Bangunan(121)(121)
4 Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan(121)(121)
5 Aset Tetap Lainnya(121)(121)
JUMLAH(122) (122)

Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
 ...(dijelaskan besaran penyusutan dengan merinci per akun neraca)...

2) Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada ...(1)... per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp...(38)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(39)... (...dalam huruf...), mutasi tambah sejumlah ...(40)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(41)... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang sejumlah ...(42)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(43)... (...dalam huruf...).

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
..... (44) (45)
..... (44) (45)
..... (44) (45)

Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
..... (46) (47)
..... (46) (47)
..... (46) (47)

Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah ...(48)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(49)... (...dalam huruf...), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah ...(50)... kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp ...(51)... (...dalam huruf...).

Aset Tak Berwujud yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah (53)... unit/Rp ...(53)....

(paragraf berikut diisi informasi lainnya yang perlu untuk diungkapkan terkait Penatausahaan dan pengelolaan BMN dimaksud).

.....(58)...

3) BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada ...(1)... per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp...(38)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(39)... (...dalam huruf...), mutasi tambah sejumlah ...(40)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(41)... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang sejumlah ...(42)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(43)... (...dalam huruf...).

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
..... (62) (62) (62)
..... (62) (62) (62)
..... (62) (62) (62)

Mutasi Kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
..... (63) (63) (63)
..... (63) (63) (63)
..... (63) (63) (63)

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada ...(1)... per ...(22)... per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah (64) (64)
2. Peralatan dan Mesin (64) (64)
3. Gedung dan Bangunan (64) (64)
4. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan (64) (64)
5. Aset Tetap Lainnya (64) (64)
JUMLAH (65) (65)

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah
 ...(dijelaskan besaran penyusutan dengan merinci per akun neraca)...

i. BMN Berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada ...(1)... per ...(22)... adalah sebanyak ...(66)... unit. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak ...(38)... unit, mutasi tambah sebanyak ...(40)... unit, dan mutasi kurang sebanyak ...(42)... unit.

Lampiran II
 Surat Direktur Barang Milik Negara
 Nomor : S - 2 /KN/2014
 Tanggal : 2 Januari 2014

Mutasi Tambah BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perolehan Barang Bersejarah (123)
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (positif) (124)

Mutasi Kurang BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (negatif) (124)
Penghapusan Barang Bersejarah (125)

3. Barang Milik Negara pada...(1)... Per ...(22)...

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada ...(1)... Per ...(22)... adalah sebesar Rp...(114)... (...dalam huruf...), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
	1 Persediaan(67)	(68)(67)	(68)(67)	(68)
	Sub Jumlah (1)(69)	(70)(69)	(70)(69)	(70)
II	Aset Tetap						
	1 Tanah(67)	(68)(67)	(68)(67)	(68)
	2 Peralatan dan Mesin(67)	(68)(67)	(68)(67)	(68)
	3 Gedung dan Bangunan(67)	(68)(67)	(68)(67)	(68)
	4 Jalan, Irigasi dan Jaringan(67)	(68)(67)	(68)(67)	(68)
	5 Aset Tetap Lainnya(67)	(68)(67)	(68)(67)	(68)
	6 KDP(67)	(68)(67)	(68)(67)	(68)
Sub Jumlah (2)(69)	(70)(69)	(70)(69)	(70)	
III	Aset Lainnya						
	1 Kemitraan dengan pihak ketiga(67)	(68)(67)	(68)(67)	(68)
	2 Aset Tak Berwujud(67)	(68)(67)	(68)(67)	(68)
	3 Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah(67)	(68)(67)	(68)(67)	(68)
Sub Jumlah (3)(69)	(70)(69)	(70)(69)	(70)	
Total	(71)	(71)	(71)	

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada ...(1)... per ...(22)... per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin(116)	(117)(116)	(117)(116)	(117)
2	Gedung dan Bangunan(116)	(117)(116)	(117)(116)	(117)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan(116)	(117)(116)	(117)(116)	(117)
4	Aset Tetap Lainnya(116)	(117)(116)	(117)(116)	(117)
	Sub Jumlah (I)(118)	(119)(118)	(119)(118)	(119)
II	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga(116)	(117)(116)	(117)(116)	(117)
2	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah(116)	(117)(116)	(117)(116)	(117)
	Sub Jumlah (II)(118)	(119)(118)	(119)(118)	(119)
	Total(120)	(120)	(120)	

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada ...(1)... per ...(22)... per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan(72)(73)(74)
2	Tanah(72)(73)(74)
3	Peralatan dan Mesin(72)(73)(74)
4	Gedung dan Bangunan(72)(73)(74)
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan(72)(73)(74)
6	Aset Tetap Lainnya(72)(73)(74)
7	KDP(72)(73)(74)
8	Aset Tak Berwujud(72)(73)(74)
9	Aset Lain-lain*)(72)(73)(74)
	Total(75)(76)(77)

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan sebesar Rp...(77)... (...dalam huruf...) dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1)
- 2)(78)...

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1 (79) (80) (81)	(82)
2 (79) (80) (81)	(82)
3 (79) (80) (81)	(82)
4 (79) (80) (81)	(82)
5 (79) (80) (81)	(82)

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada ...(1)... per ...(22)... adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah (83) (84)
2	Peralatan dan Mesin (83) (84)
3	Gedung & Bangunan (83) (84)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan (83) (84)
5	Aset tetap lainnya (83) (84)
Jumlah	 (85) (86)

(Paragraf berikut diisi keterangan/informasi-informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan penetapan status penggunaan BMN tersebut. Bila tidak ada yang perlu disampaikan, isian ini dapat ditiadakan).

-
-(87)...

b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang *)(88)(88)(88)(88)(89)
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang(88)(88)(88)(88)(89)
3	Dalam proses Pengelola Barang(88)(88)(88)(88)(89)
4	Selesai di Pengelola Barang(88)(88)(88)(88)(89)
	a.Dikembalikan(88)(88)(88)(88)(89)
	b.Ditolak(88)(88)(88)(88)(89)
	c.Disetujui(88)(88)(88)(88)(89)
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang(88)(88)(88)(88)(89)
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang(88)(88)(88)(88)(89)
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang(88)(88)(88)(88)(89)
8	Selesai serah terima(88)(88)(88)(88)(89)

Keterangan: *) hanya diperlakukan untuk proses pengelolaan di tingkat UAKPB, UAPPB-W, dan UAPPB-E1

1/2014
 2014

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut di atas, terdapat proses pengelolaan yang gagal/batal dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut: *(bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan)*

1.
2.(90)..

(Paragraf berikut diisi keterangan/informasi-informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).

1.
2.(90)....

c. **Pengelolaan BMN Idle**

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle(91)
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola(91)
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola(91)
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna(91)
5	Selesai serah terima kepada Pengelola(91)

(Paragraf berikut diisi keterangan/informasi-informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan penyerahan BMN Idle tersebut (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).

1.
2.(92)...

3. **BMN Dari Dana Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan**

(diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB, jika tidak ada tidak perlu diisi).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dan mengelola BMN yang berasal dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan barang.

Daftar satker yang sampai dengan per ...(22)... masih mengelola BMN yang berasal dari dana dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

No	Daftar Satker	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1	(93) (94)(95)(95)(95)
2	(93) (94)(95)(95)(95)
3	(93) (94)(95)(95)(95)
Total	(96)(96)(96)

Daftar satker yang sampai dengan per ...(22)... masih mengelola BMN yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut:

No	Daftar Satker	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1	(93) (94)(95)(95)(95)
2	(93) (94)(95)(95)(95)
3	(93) (94)(95)(95)(95)
Total	(96)(96)(96)

4. **BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum**
(diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB, jika tidak ada tidak perlu diisi).

Berdasarkan hasil penghimpunan dari pengungkapan data BLU dan informasi penyusutan satker BLU, dapat disajikan sebagai berikut:

Kode Satker	Satker Badan Layanan Umum	Nilai Perolehan Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
...(97)(98)(99)(100)(101)
TOTAL	(102)(102)(102)

5. BMN.....

5. **BMN Dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999) (diungkapkan apabila ada, jika tidak ada tidak perlu diisi).**

Terdapat BMN dari dana Belanja Lain-lain pada ...(1)... per ...(22)... adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1	(103) (104)(105)(105)(105)
2	(103) (104)(105)(105)(105)
3	(103) (104)(105)(105)(105)
Total	(106)(106)(106)

Atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.

6. **Informasi Terkait BMN yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang (diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk tingkat UAKPB, jika tidak ada tidak perlu diisi)**

a. **Daftar Barang Hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang.**

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada ...(1)... per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp...(126)... (...dalam huruf...) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp...(127)... (...dalam huruf...). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada ...(1)... per ...(22)... dan disajikan sebagai Daftar Barang Hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	(107) (108)(128)(129)
2	(107) (108)(128)(129)
3	(107) (108)(128)(129)
Total	(130)(131)

b. **Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang.**

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada ...(1)... per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp...(126)... (...dalam huruf...).

Lampiran II
 Surat Direktur Barang Milik Negara
 Nomor : S - 2 /KN/2014
 Tanggal : 2 Januari 2014

huruf...) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp...(127)... (...dalam huruf...). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada ...(1)... per ...(22)... dan disajikan sebagai Daftar Barang dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	(107) (108)(128)(129)
2	(107) (108)(128)(129)
3	(107) (108)(128)(129)
Total		(130)	(131)

7. **BMN Berupa Aset Tetap Yang Dinyatakan Hilang Dan Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang**
(diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB, jika tidak ada tidak perlu diisi).

Terdapat BMN yang dinyatakan hilang dan sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada ...(1)... per ...(22)..., adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	(107) (108)(128)(129)
2	(107) (108)(128)(129)
3	(107) (108)(128)(129)
Total		(130)	(131)

(Paragraf berikut diisi keterangan/informasi-informasi yang perlu diungkapkan terkait pengelolaan BMN berupa BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang tersebut. Bila tidak ada yang perlu disampaikan isian ini dapat diiadakan).

1.(111)...
2.(111)...

8. **BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat yang Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang**
(diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB, jika tidak ada tidak perlu diisi).

Terdapat BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada ...(1)... per ...(22)..., adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	(107) (108)(128)(129)
2	(107) (108)(128)(129)
3	(107) (108)(128)(129)
Total		(130)	(131)

(Paragraf berikut diisi keterangan/informasi-informasi yang perlu diungkapkan terkait pengelolaan BMN berupa BMN dalam kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang tersebut. Bila tidak ada yang perlu disampaikan isian ini dapat diiadakan).

1.(112)...
2.(112)...

9. **BMN Berupa BPYBDS (diungkapkan apabila ada, jika tidak ada tidak perlu diisi)**

Terdapat BMN yang masuk sebagai BPYBDS pada ...(1)... per ...(22)..., adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai
1	(107) (108) (109)
2	(107) (108) (109)
3	(107) (108) (109)
Total		(110)

(Paragraf berikut diisi keterangan/informasi-informasi yang perlu diungkapkan terkait pengelolaan BMN berupa BPYBDS tersebut. Bila tidak ada yang perlu disampaikan isian ini dapat diabaikan).

1.
2. (113)...

10. **Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN**

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain :

- a.;
- b. (132)...

11. **Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah**

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada K/L, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a.;
- b. (133)...

Penanggungjawab ...(1)... ...(2)...
Kepala Kantor/Kuasa Pengguna Barang

Nama terang (xxx)
NIP/NRP (xxx)

CARA PENGISIAN FORMAT
CATATAN ATAS LAPORAN BMN (CaLBMN)

1. Disesuaikan dengan jenis laporan dan jenjang pelaporannya, yaitu:
 - (a) Untuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)/Satuan Kerja (satker), diisi dengan:
 - Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran, untuk CaLBMN laporan Semesteran; atau
 - Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan, untuk CaLBMN laporan Tahunan.
 - (b) Untuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Tingkat Wilayah (UAPPB-W)/Kordinator Wilayah (korwil), diisi dengan:
 - Laporan Barang Pengguna Wilayah Semesteran, untuk CaLBMN laporan Semesteran; atau
 - Laporan Barang Pengguna Wilayah Tahunan, untuk CaLBMN laporan Tahunan.
 - (c) Untuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Tingkat Eselon I (UAPPB-E1)/Kordinator Eselon I (kores1), diisi dengan:
 - Laporan Barang Pengguna Eselon I Semesteran, untuk CaLBMN laporan Semesteran; atau
 - Laporan Barang Pengguna Eselon I Tahunan, untuk CaLBMN laporan Tahunan.
 - (d) Untuk Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)/Kementerian/Lembaga (K/L), diisi dengan:
 - Laporan Barang Pengguna Semesteran, untuk CaLBMN laporan Semesteran; atau
 - Laporan Barang Pengguna Tahunan, untuk CaLBMN laporan Tahunan.
2. Diisi periode pelaporan BMN.
Disesuaikan dengan jenis periode laporan, yaitu:
 - (a) Semester I/II Tahun Anggaran 20xx, untuk CALBMN Laporan Semesteran;
 - (b) Tahun Anggaran 20xx, untuk CALBMN Laporan Tahunan.
3. Diisi nama entitas penyusun laporan barang.
4. Diisi tanggal akhir periode pada laporan periode berjalan.
Contoh: per 31 Desember 2015 (*untuk laporan tahunan Tahun 2015*).
5. Diisi tanggal akhir periode pada laporan sebelumnya yang menjadi saldo awal pada laporan periode berjalan.
Contoh: per 30 Juni 2015 (*untuk laporan semester I Tahun 2015*).
6. Diisi total realisasi belanja yang menjadi BMN (baik persediaan maupun aset tetap).
7. Diisi jumlah satker yang dihimpun menjadi laporan, jumlah ditulis angka dan huruf.
8. Diisi jumlah satker Kantor Pusat (KP) yang dihimpun menjadi laporan, jumlah ditulis angka dan huruf.
9. Diisi jumlah satker Kantor Daerah (KD) yang dihimpun menjadi laporan, jumlah ditulis angka dan huruf (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
10. Diisi jumlah satker Dekonsentrasi (DK) yang dihimpun menjadi laporan, jumlah ditulis angka dan huruf (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
11. Diisi jumlah satker Tugas Pembantuan (TP) yang dihimpun menjadi laporan, jumlah ditulis angka dan huruf (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
12. Diisi jumlah satker Badan Layanan Umum (BLU) yang dihimpun menjadi laporan, jumlah ditulis angka dan huruf (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
13. Diisi jumlah satker lainnya selain KP, KD, DK, TP dan BLU yang dihimpun menjadi laporan, jumlah ditulis angka dan huruf (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
14. Diisi tanggal awal periode laporan periode berjalan, contoh: per 01 Januari 2012 (*untuk laporan tahunan 2012*).

15. Diisi nilai BMN Gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada periode laporan sebelumnya (yang menjadi nilai saldo awal laporan berjalan).
16. Diisi jumlah Nilai Neraca BMN (intrakomptabel) yang menjadi nilai saldo awal pada laporan periode berjalan, contoh: nilai neraca per 01 Januari 2012 untuk laporan tahunan 2012.
17. Diisi jumlah Nilai BMN ekstrakomptabel yang menjadi nilai saldo awal pada laporan periode berjalan, contoh: nilai neraca per 01 Januari 2012 untuk laporan tahunan 2012.
18. Diisi nilai perubahan saldo awal (selisih antara nilai laporan barang periode sebelumnya dibandingkan dengan nilai saldo awal pada laporan periode berjalan), disajikan/dihitung dari nilai BMN gabungan (neraca dan ekstrakomptabel).
19. Diisi nilai perubahan saldo awal (selisih antara nilai laporan barang periode sebelumnya dibandingkan dengan nilai saldo awal pada laporan periode berjalan), disajikan/dihitung dari nilai BMN neraca/intrakomptabel.
20. Diisi nilai perubahan saldo awal (selisih antara nilai laporan barang periode sebelumnya dibandingkan dengan nilai saldo awal pada laporan periode berjalan), disajikan/dihitung dari nilai BMN ekstrakomptabel.
21. Diisi penjelasan dari entitas laporan terkait adanya perubahan saldo awal tersebut.
22. Diisi tanggal akhir periode pada laporan periode berjalan, contoh: per 31 Desember 2012 (untuk laporan tahunan 2012).
23. Diisi jumlah nilai saldo akhir persediaan (per tanggal akhir periode laporan) pada periode berjalan.
24. Diisi jumlah nilai saldo awal persediaan (per tanggal awal periode laporan) periode berjalan.
25. Diisi jumlah nilai bersih (net) mutasi persediaan (nilai saldo akhir dikurangi nilai saldo awal) pada periode berjalan.
26. Diisi kode akun neraca persediaan dirinci per akun neraca, contoh: 117111
27. Diisi uraian barang persediaan dirinci per kode akun neraca, contoh: Barang Konsumsi.
28. Diisi nilai saldo awal barang persediaan dirinci per akun neraca, contoh: 10.000.000.
29. Diisi nilai bersih (net) mutasi barang persediaan per akun neraca, contoh: (500.000).
30. Nilai saldo akhir barang persediaan dirinci per akun neraca, contoh: 9.500.000
31. Jumlah/Total Saldo Awal Barang Persediaan.
32. Jumlah/Total Mutasi Barang Persediaan.
33. Jumlah/Total Saldo Akhir Barang Persediaan.
34. Jumlah/Total nilai barang Persediaan dalam kondisi rusak/usang (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
35. Nilai Persediaan yang kondisinya rusak.
36. Nilai Persediaan yang kondisinya usang.
37. Nilai saldo akhir BMN dimaksud pada laporan periode berjalan.
38. Jumlah kuantitas saldo awal BMN dimaksud pada laporan periode berjalan.
39. Jumlah nilai saldo awal BMN dimaksud pada laporan periode berjalan.
40. Jumlah kuantitas mutasi tambah pada BMN dimaksud pada laporan periode berjalan.
41. Jumlah nilai mutasi tambah pada BMN dimaksud pada laporan periode berjalan.
42. Jumlah kuantitas mutasi kurang pada BMN dimaksud pada laporan periode berjalan.
43. Jumlah nilai mutasi kurang pada BMN dimaksud pada laporan periode berjalan.
44. Diisi nama transaksi per jenis dan kode transaksi yang termasuk/berpengaruh sebagai mutasi tambah pada BMN dimaksud pada laporan periode berjalan.
Disebutkan jenis transaksi yang ada/dipakai di periode berjalan, (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).

45. Diisi nilai mutasi tambah intrakomptabel/ekstrakomptabel per jenis transaksi yang berpengaruh sebagai mutasi tambah pada BMN dimaksud pada laporan periode berjalan.
46. Diisi nama transaksi per jenis dan kode transaksi yang termasuk/berpengaruh sebagai mutasi kurang pada BMN dimaksud pada laporan periode berjalan.
Disebutkan jenis transaksi yang ada/dipakai di periode berjalan (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
47. Diisi nilai mutasi kurang intrakomptabel/ekstrakomptabel per jenis transaksi yang berpengaruh sebagai mutasi kurang pada BMN dimaksud pada laporan periode berjalan.
48. Diisi jumlah kuantitas BMN dimaksud yang sebagian/seluruhnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sesuai ketentuan berlaku.
Pemanfaatan tanah pada pihak ketiga dapat berupa:
 - (a) Sewa;
 - (b) Pinjam pakai;
 - (c) Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
 - (d) Bangun Guna Serah (BGS)/ Bangun Serah Guna (BSG);
 - (e) Pemanfaatan lainnya sesuai ketentuan.*Jika tidak terdapat informasi terkait, maka isian ini dapat ditiadakan.*
49. Diisi jumlah nilai BMN dimaksud yang sebagian/seluruhnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
50. Diisi jumlah kuantitas BMN dimaksud yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
51. Diisi jumlah nilai BMN dimaksud yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
52. Diisi jumlah nilai/kuantitas BMN dimaksud yang kondisinya BAIK/RUSAK RINGAN/RUSAK BERAT (dipilih salah satu) pada periode laporan berjalan.
53. Diisi jumlah kuantitas/nilai BMN dimaksud yang sudah dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah, karena berbagai sebab (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
54. Diisi jumlah kuantitas/nilai tanah yang sedang dalam kondisi sengketa, karena berbagai sebab (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
55. Diisi jumlah kuantitas/nilai tanah yang tidak punya bukti kepemilikan, sedang dalam proses pensertipikatan, dan/atau bukti kepemilikan hilang.
56. Diisi jumlah kuantitas/nilai tanah yang sedang dikuasai pihak ketiga tidak sesuai ketentuan. Pihak ketiga dapat merupakan Pemerintah Daerah, perorangan dan/atau lembaga/organisasi swasta/pemerintah.
57. Permasalahan atas tanah selain 3 (tiga) hal di atas, disebutkan permasalahannya (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
58. Diisi informasi lainnya yang perlu untuk diungkapkan terkait Penatausahaan dan pengelolaan BMN tersebut (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
59. Diisi dengan nama bidang dalam akun yang bersangkutan terdiri dari:

I. Akun Peralatan dan Mesin dengan perincian bidang barang sebagai berikut:	
1) Alat Besar (3.01)	8) Alat Laboratorium (3.08)
2) Alat Angkutan (3.02)	9) Alat Persenjataan (3.09)
3) Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)	10) Komputer (3.10)
4) Alat Pertanian (3.04)	11) Alat Eksplorasi (3.11)
5) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)	12) Alat Pengeboran (3.12)
6) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)	13) Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)
7) Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)	

I. Akun Peralatan dan Mesin dengan perincian bidang barang sebagai berikut:	
14) Alat Bantu Eksplorasi (3.14) 15) Alat Keselamatan Kerja (3.15) 16) Alat Peraga (3.16)	17) Peralatan Proses/Produksi (3.17) 18) Rambu-Rambu (3.18) 19) Peralatan Olah Raga (3.19)
II. Akun Gedung dan Bangunan dengan perincian bidang barang sebagai berikut: 1) Bangunan Gedung (4.01) 2) Monumen (4.02) 3) Bangunan Menara (4.03) 4) Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)	
III. Akun Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan dengan perincian bidang barang sebagai berikut: 1) Jalan dan Jembatan (5.01) 2) Bangunan Air (5.02) 3) Instalasi (5.03) 4) Jaringan (5.04)	
IV. Akun Aset Tetap Lainnya dengan perincian bidang barang sebagai berikut: 1) Bahan Perpustakaan (6.01) 2) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga (6.02) 3) Hewan (6.03) 4) Ikan (6.04) 5) Tanaman (6.05) 6) Barang Koleksi Non Budaya (6.06) 7) Aset Tetap Dalam Renovasi (6.07)	

Contoh:

Alat Besar (3.01)

Saldo "Alat Besar" pada "Nama entitas penyusun Laporan barang" per tanggal akhir periode laporan, misal: per 31 Desember 2012 (untuk laporan tahunan 2012)....sebesar Rp.....(nilai BMN). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal kuantitas (unit/buah), saldo awal Nilai BMN (dalam rupiah) mutasi tambah-kuantitas (unit/buah) Rp.....nilai BMN (dalam rupiah) mutasi kurang kuantitas (unit/buah) Rp.....nilai BMN (dalam rupiah).

Contoh tersebut berlaku untuk semua bidang barang pada setiap jenis akun.

60. Diisi nama transaksi per jenis transaksi dan nilai KDP yang termasuk/berpengaruh sebagai mutasi tambah KDP pada laporan periode berjalan.

Jenis transaksi yang termasuk sebagai mutasi tambah KDP pada pembukuan:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| (a) 501 Saldo Awal KDP | (d) 504 Koreksi Nilai KDP (positif) |
| (b) 502 Perolehan/Penambahan KDP | (e) 506 Transfer Masuk KDP |
| (c) 503 Pengembangan KDP | (f) 508 Hibah Masuk KDP |

Disebutkan jenis transaksi yang ada/dipakai di periode berjalan (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).

61. Diisi nama transaksi per jenis transaksi yang termasuk/berpengaruh sebagai mutasi kurang KDP pada laporan periode berjalan.

Kode dan Jenis transaksi yang termasuk sebagai mutasi kurang KDP pada pembukuan BMN:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| (a) 504 Koreksi Nilai KDP (negatif) | (d) 509 Hibah Keluar KDP |
| (b) 505 Penghapusan/Penghentian KDP | (e) 599 Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi |
| (c) 507 Transfer Keluar KDP | |

Disebutkan jenis transaksi yang ada/dipakai di periode berjalan (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).

62. Diisi nama transaksi per jenis transaksi yang termasuk/berpengaruh sebagai mutasi tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada laporan periode berjalan .
Jenis transaksi yang termasuk sebagai mutasi tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada pembukuan BMN adalah Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya dari Aset Tetap (188).
Disebutkan jenis transaksi yang ada/dipakai di periode berjalan (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
63. Diisi nama transaksi per jenis transaksi yang termasuk/berpengaruh sebagai mutasi kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada laporan periode berjalan.
Kode dan Jenis transaksi yang termasuk sebagai mutasi kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada pembukuan BMN adalah:
 - (a) 402 Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaannya
 - (b) 391 Penghapusan (BMN yang dihentikan)
 - (c) 392 Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)
 - (d) 394 Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)
 - (e) 393 Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)
 - (f) 395 Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)
 - (g) 396 Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN yang dihentikan)
 - (h) 397 Reklasifikasi Aset Lainnya ke Aset BPYBDS (BMN yang dihentikan)
 - (i) 398 Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN yang dihentikan)Disebutkan jenis transaksi yang ada/dipakai di periode berjalan (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
64. Diisi saldo akhir-Nilai intrakomptabel/ekstrakomptabel BMN yang telah dihentikan penggunaannya per golongan barang .
65. Diisi total Saldo Akhir Nilai intrakomptabel/ekstrakomptabel BMN yang telah dihentikan penggunaannya per golongan barang.
66. Diisi jumlah kuantitas barang bersejarah.
67. Diisi nilai Saldo Akhir Laporan intrakomptabel/ekstrakomptabel/gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) per akun neraca pada akun neraca dimaksud pada laporan periode berjalan.
68. Diisi angka persentase untuk nilai dimaksud dibandingkan dengan total nilai neraca BMN pada laporan intrakomptabel/ekstrakomptabel/gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada laporan periode berjalan.
69. Diisi jumlah Nilai Saldo Akhir Laporan intrakomptabel /ekstrakomptabel/gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada kelompok akun neraca dimaksud pada laporan periode berjalan.
70. Diisi angka persentase untuk nilai dimaksud dibandingkan dengan total nilai neraca BMN pada laporan intrakomptabel/ekstrakomptabel/gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada laporan periode berjalan.
71. Diisi total Nilai Saldo Akhir Laporan intrakomptabel/ekstrakomptabel/gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada laporan periode berjalan.
72. Diisi Nilai Saldo Akhir laporan barang intrakomptabel untuk kelompok akun neraca dimaksud pada laporan periode berjalan.
73. Diisi nilai neraca aset pada laporan keuangan untuk kelompok akun neraca dimaksud pada laporan periode berjalan.
74. Diisi selisih antara nilai neraca aset pada laporan keuangan dan laporan barang untuk akun neraca dimaksud.
75. Diisi jumlah Nilai Saldo Akhir laporan barang intrakomptabel (neraca) pada laporan periode berjalan.
76. Diisi jumlah Nilai neraca aset pada laporan keuangan pada laporan periode berjalan.

77. Diisi jumlah Selisih antara nilai neraca aset pada laporan keuangan dan laporan barang.
78. Pengungkapan terkait adanya perbedaan penyajian nilai per akun neraca antara laporan barang dan laporan keuangan, bila tidak terdapat selisih, maka uraiannya dapat diungkapkan sebagai berikut:
"Tidak terdapat perbedaan penyajian nilai per akun neraca antara laporan barang dan laporan keuangan pada ... (1) per ...(22)."
79. Diisi jenis laporan yang sama dengan laporan periode berjalan selama 5 (lima) periode laporan terakhir, contoh: untuk penyusunan laporan Tahunan TA 2012, maka laporan sejenis untuk 5 (lima) periode laporan terakhir adalah *laporan Tahunan TA 2008, laporan Tahunan TA 2009, laporan Tahunan TA 2010, laporan Tahunan TA 2011, dan laporan Tahunan TA 2012.*
80. Diisi nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada periode laporan dimaksud.
81. Diisi perubahan nilai BMN antara jumlah laporan gabungan periode dimaksud dibandingkan dengan nilai BMN pada periode sebelumnya.
82. Diisi persentase perubahan nilai BMN antara jumlah laporan gabungan periode dimaksud dibandingkan dengan nilai BMN pada periode sebelumnya.
83. Diisi nilai dari BMN yang sudah ditetapkan statusnya, baik oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang, sesuai kelompok BMN, sampai dengan periode laporan berjalan.
84. Diisi nilai dari BMN yang belum ditetapkan statusnya, baik oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang, sesuai kelompok BMN, sampai dengan periode laporan berjalan.
85. Diisi jumlah Nilai dari BMN yang sudah ditetapkan statusnya, baik oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang, sesuai kelompok BMN, sampai dengan periode laporan berjalan.
86. Diisi jumlah Nilai dari BMN yang belum ditetapkan statusnya, baik oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang, sesuai kelompok BMN, sampai dengan periode laporan berjalan.
87. Diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan penetapan status penggunaan BMN tersebut (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
88. Diisi jumlah paket usulan status penggunaan/pemanfaatan/pemindahtanganan/ penghapusan pada tahap proses dimaksud, pada periode laporan berjalan.
89. Diisi jumlah total paket usulan pengelolaan BMN pada tahap proses dimaksud, pada periode laporan berjalan.
90. Diisi keterangan/informasi-informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan usulan pengelolaan BMN tersebut (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
91. Diisi jumlah paket usulan terkait pengelolaan BMN *idle*, pada periode laporan berjalan.
92. Diisi keterangan/informasi-informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan usulan pengelolaan BMN *idle* tersebut (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
93. Diisi kode Lokasi Kuasa Pengguna Barang dengan format:
<kode KL>.<Kode Eselon I>.<Kode Wilayah>.<Kode Satker>.<Jenis Kewenangan>
Contoh: 026.06.0100.123456.DK
94. Diisi uraian nama satker, contoh: *Dinas Tenaga Kerja dan Keimigrasian Kota Jakarta.*
95. Diisi saldo Akhir Laporan intrakomptabel/ekstrakomptabel/gabungan (intrakomptabel/ekstrakomptabel) pada laporan periode berjalan.
96. Diisi total Nilai Saldo Akhir Laporan intrakomptabel/ekstrakomptabel/gabungan (intrakomptabel/ekstrakomptabel) pada laporan periode berjalan.
97. Diisi kode satker BLU.
98. Diisi nama Satker BLU.
99. Diisi nilai BMN perolehan aset tetap satker BLU untuk satker dimaksud pada laporan periode berjalan.

100. Diisi Nilai Akumulasi Penyusutan satker BLU pada laporan periode berjalan.
101. Diisi Nilai Buku satker BLU pada laporan periode berjalan.
102. Diisi total nilai perolehan/akumulasi penyusutan/nilai buku satker BLU pada laporan periode berjalan.
103. Diisi kode Lokasi Kuasa Pengguna Barang dengan format:
<kode KL>. <Kode Eselon I>. <Kode Wilayah>. <Kode Satker>. <Jenis Kewenangan>
Contoh: 026.06.0100.123456.DK
104. Diisi uraian nama satker, contoh: *Dinas Tenaga Kerja dan Keimigrasian Kota Jakarta*.
105. Diisi nilai BMN Intrakomptabel/ekstrakomptabel/gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang berasal dari BA.999.07. dan BA.999.08.
106. Diisi total nilai BMN Intrakomptabel/ekstrakomptabel/gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang berasal dari BA.999.07. dan BA.999.08.
107. Diisi kode Lokasi Kuasa Pengguna Barang dengan format:
<kode KL>. <Kode Eselon I>. <Kode Wilayah>. <Kode Satker>. <Jenis Kewenangan>
Contoh: 026.06.0100.123456.DK
108. Diisi uraian nama satker, contoh: *Dinas Tenaga Kerja dan Keimigrasian Kota Jakarta*.
109. Diisi nilai BMN yang menjadi BPYBDS untuk satker dimaksud pada laporan periode berjalan.
110. Diisi jumlah nilai BMN yang menjadi BPYBDS pada *entitas laporan* dimaksud.
111. Diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan pengelolaan BMN Berupa Aset Tetap Yang Dinyatakan Hilang Dan Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
112. Diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan pengelolaan BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat yang Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang.
113. Diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan pengelolaan BMN berupa BPYBDS tersebut (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
114. Diisi nilai BMN Gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada laporan periode berjalan.
115. Diisi jumlah nilai mutasi BMN pada laporan periode berjalan.
116. Diisi nilai akumulasi penyusutan intrakomptabel/ekstrakomptabel/gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) per akun neraca pada akun neraca dimaksud pada laporan periode berjalan.
117. Diisi angka persentase untuk nilai akumulasi dimaksud dibandingkan dengan total nilai akumulasi penyusutan pada laporan periode berjalan.
118. Diisi jumlah nilai akumulasi penyusutan intrakomptabel/ekstrakomptabel/ gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada kelompok akun neraca dimaksud pada laporan periode berjalan.
119. Diisi angka persentase untuk jumlah nilai akumulasi kelompok akun neraca dimaksud dibandingkan dengan total nilai akumulasi penyusutan pada laporan periode berjalan.
120. Diisi total nilai akumulasi penyusutan intrakomptabel/ekstrakomptabel/ gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada laporan periode berjalan.
121. Diisi nilai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga intrakomptabel/ekstrakomptabel per golongan barang pada laporan periode berjalan.
122. Diisi jumlah nilai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga intrakomptabel/ ekstrakomptabel per golongan barang pada laporan periode berjalan.
123. Diisi jumlah perolehan/penambahan kuantitas BMN berupa barang bersejarah karena transaksi perolehan pada periode berjalan.
124. Diisi jumlah penambahan/pengurangan kuantitas BMN berupa barang bersejarah karena perubahan/koreksi pada periode berjalan.

Lampiran II
Surat Direktur Barang Milik Negara
Nomor : S - 2 /KN/2014
Tanggal : 2 Januari 2014

125. Diisi jumlah penghapusan/pengurangan kuantitas BMN berupa barang bersejarah karena transaksi perolehan pada periode berjalan.
126. Diisi nilai saldo akhir Barang Hilang/Barang Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang-intrakomptabel pada periode berjalan.
127. Diisi nilai saldo akhir Barang Hilang/Barang Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang-ekstrakomptabel pada periode berjalan.
128. Diisi nilai perolehan Barang Hilang/Barang Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang-gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada periode berjalan.
129. Diisi nilai buku Barang Hilang/Barang Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang-gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada periode berjalan.
130. Diisi jumlah nilai perolehan Barang Hilang/Barang Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang-gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada periode berjalan.
131. Jumlah nilai buku Barang Hilang/Barang Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang-gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada periode berjalan.
132. Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN.
133. Diisi langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada K/L.